

## Analisis Kualitas Pelaporan Keuangan Ditinjau Dari Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Niken Wulan Ashari<sup>1\*</sup>, Maya Widiana Dewi<sup>2</sup>, Sri Laksmi Pardanawati<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Fakultas Ekonomi Bisnis, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia, Sukoharjo, Indonesia

### Alamat Email:

wniken06@gmail.com<sup>1\*</sup>, widyamine77@gmail.com<sup>2</sup>, laksmi.stie.aas@gmail.com<sup>3</sup>

### Sitasi Artikel:

Ashari, N. W., Dewi, M. W., & Pardanawati, S. L., (2025). Analisis Kualitas Pelaporan Keuangan Ditinjau Dari Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia. *Jurnal Ilmiah Keuangan dan Akuntansi Bisnis*, 4(2), 769-778.

**Abstract:** *This study aims to examine the effect of accounting information systems, government internal control systems, and human resource competence on the quality of local government financial reporting. The population consists of employees responsible for financial administration and accounting functions in 35 Regional Apparatus Organizations (OPD) of Sukoharjo Regency, with a sample of 60 respondents selected through purposive sampling. Data were collected using questionnaires and analyzed with multiple linear regression, supported by validity, reliability, and classical assumption tests. The findings reveal that accounting information systems and human resource competence have a significant positive effect on financial reporting quality, while the government's internal control system has no significant effect. These results highlight the importance of strengthening accounting information systems and enhancing human resource competence to achieve transparent and accountable local government financial reporting.*

**Keywords:** *accounting information systems, government internal control systems, human resource competence, financial reporting quality.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal pemerintahan, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Populasi penelitian adalah seluruh pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi tata usaha keuangan pada 35 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sukoharjo, dengan jumlah sampel sebanyak 60 responden yang dipilih melalui purposive sampling. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan uji validitas, reliabilitas, dan asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Sementara itu, sistem pengendalian internal pemerintahan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas sistem informasi akuntansi dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia guna mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel.

**Kata Kunci:** *sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal pemerintahan, kompetensi sumber daya manusia, kualitas pelaporan keuangan.*

## 1. Pendahuluan

Pelaporan keuangan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, serta sebagai instrumen pertanggungjawaban publik atas pengelolaan sumber daya keuangan negara. Laporan keuangan yang berkualitas tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan kepatuhan formal terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), tetapi juga harus mampu menyajikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, serta tepat waktu sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan ekonomi, politik, maupun sosial (Bestari & Wahyuni, 2023). Namun, realitas menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih menghadapi tantangan. BPK masih menemukan opini tidak wajar pada sejumlah laporan keuangan daerah yang mengindikasikan lemahnya pengendalian internal dan rendahnya kualitas informasi yang disajikan. Kondisi ini diperburuk dengan terbatasnya kompetensi sumber daya manusia di bidang akuntansi yang berdampak pada keterlambatan pelaporan serta kurang optimalnya pemanfaatan sistem akuntansi berbasis teknologi (Armono et al., 2023). Fenomena serupa juga terjadi di Kabupaten Sukoharjo, di mana masih terdapat kendala dalam peningkatan kapasitas aparatur OPD yang mengelola keuangan serta rendahnya pemanfaatan teknologi akuntansi secara merata. Hal ini menunjukkan bahwa kajian empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tetap relevan dan mendesak untuk dilakukan.

Berbagai penelitian telah berupaya menjelaskan determinan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, tetapi hasilnya menunjukkan ketidakkonsistenan. Ony Widilestariningtyas dan Azijah (2024) menemukan bahwa kompetensi SDM dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan penelitian Dawu et al. (2024)

di Kota Kupang justru menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Kartika dan Ningsih (2024) yang juga menemukan lemahnya pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan, meskipun faktor kompetensi SDM tetap berpengaruh. Sebaliknya, penelitian lain menemukan bahwa penerapan teknologi informasi dan standar akuntansi justru mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan ketika didukung oleh kompetensi SDM yang baik (Widodo et al., 2025). Perbedaan hasil penelitian ini mengindikasikan adanya research gap, khususnya mengenai peran sistem pengendalian internal yang di satu sisi dianggap penting dalam literatur, tetapi di sisi lain sering tidak signifikan dalam temuan empiris.

Selain inkonsistensi hasil, keterbatasan penelitian sebelumnya juga terletak pada fokus yang masih bersifat parsial dan belum banyak menguji interaksi antarvariabel. Sebagian besar penelitian hanya menilai pengaruh langsung tanpa mempertimbangkan kemungkinan adanya variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut, misalnya peran kompetensi SDM dalam mengoptimalkan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal. Padahal, perkembangan era digital menuntut bahwa kualitas laporan keuangan tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap standar akuntansi, melainkan juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan sistem akuntansi berbasis teknologi yang modern serta kompetensi pegawai dalam mengoperasikannya (Suhardi, 2025). Dengan demikian, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menguji sejauh mana sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal pemerintahan, dan kompetensi SDM secara simultan maupun parsial memengaruhi kualitas pelaporan keuangan, khususnya pada konteks



lokal seperti OPD Kabupaten Sukoharjo.

Novelty penelitian ini terletak pada upaya menguji ketiga variabel utama tersebut secara bersamaan dalam konteks lokal, sekaligus memberikan bukti empiris apakah penguatan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi dan peningkatan kompetensi SDM dapat mengimbangi kelemahan pengendalian internal yang kerap tidak signifikan dalam penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi pada literatur dengan menambahkan perspektif baru dari daerah yang belum banyak diteliti, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal pemerintahan, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, baik secara parsial maupun simultan. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoritis dalam menjawab inkonsistensi temuan terdahulu, sekaligus kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah, khususnya OPD di Kabupaten Sukoharjo, dalam memperkuat sistem informasi akuntansi, memperbaiki pengendalian internal, dan meningkatkan kompetensi SDM sehingga mampu menyajikan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

## 2. Tinjauan Teoritis

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan komponen penting dalam proses pengelolaan keuangan pemerintah daerah karena berfungsi sebagai sarana pencatatan, pengolahan, penyimpanan, serta penyajian data keuangan yang dibutuhkan oleh berbagai pihak berkepentingan. SIA yang terintegrasi dengan baik akan menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan tepat waktu, sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan. Seiring dengan transformasi digital, peran SIA semakin strategis karena digitalisasi memungkinkan proses pencatatan transaksi dilakukan secara otomatis,

mengurangi potensi kesalahan manual, dan mempercepat penyusunan laporan keuangan. Hafiz et al. (2022) menemukan bahwa penggunaan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi memberikan dampak signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Demikian pula, Suhardi (2025) menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi dalam SIA dapat meningkatkan kualitas laporan dengan memperkuat keandalan data serta mengurangi risiko manipulasi informasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kualitas SIA menjadi faktor krusial dalam menentukan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H1. *Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.*

Selain SIA, faktor penting lain yang memengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP). Pengendalian internal pada dasarnya merupakan mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi berjalan sesuai tujuan, bebas dari kecurangan, dan menghasilkan informasi keuangan yang dapat dipercaya. Menurut kerangka COSO, pengendalian internal mencakup lima komponen yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Dalam konteks pemerintahan daerah, pengendalian internal berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan anggaran, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta mendukung akuntabilitas publik. Namun, temuan empiris menunjukkan bahwa pengaruh SPIP terhadap kualitas laporan keuangan tidak selalu konsisten. Penelitian Kartika dan Ningsih (2024) di Kabupaten Jember menyatakan bahwa SPIP tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan, meskipun secara teoritis seharusnya mendukung integritas laporan keuangan. Hasil serupa ditemukan oleh Dawu et al. (2024) di Kota Kupang, di mana pengendalian internal tidak mampu secara



langsung meningkatkan kualitas laporan keuangan tanpa didukung oleh faktor lain. Sebaliknya, penelitian Widodo et al. (2025) menekankan bahwa SPIP dapat berfungsi optimal apabila ditopang oleh kompetensi aparatur dan pemanfaatan teknologi. Inkonsistensi ini mengindikasikan bahwa efektivitas SPIP dalam memengaruhi kualitas laporan keuangan sangat bergantung pada konteks organisasi, kualitas implementasi, dan dukungan SDM.

H2. *Sistem pengendalian internal pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.*

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi faktor lain yang sangat menentukan kualitas laporan keuangan. Kompetensi dalam konteks akuntansi pemerintahan mencakup pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), keterampilan teknis dalam mengoperasikan sistem akuntansi berbasis digital, pengalaman kerja, serta etika profesional. Widilestariningtyas dan Azijah (2024) membuktikan bahwa kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Subang. Hal ini diperkuat oleh penelitian Armono et al. (2023) yang menemukan bahwa peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sayidah et al. (2024) melalui systematic review juga menyimpulkan bahwa variabel kompetensi SDM merupakan faktor yang paling konsisten berpengaruh dalam berbagai penelitian regional. Hal ini dapat dipahami karena meskipun sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal telah tersedia, tanpa SDM yang kompeten untuk mengoperasikan dan mengawasinya, kualitas laporan keuangan tidak akan optimal. Dengan kata lain, SDM yang kompeten bertindak sebagai penggerak utama dalam menjaga kualitas laporan.

H3. *Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.*

Sementara itu, kualitas pelaporan keuangan sendiri dapat diukur berdasarkan karakteristik kualitatif yang ditetapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan dan *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS), yaitu relevansi, keandalan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan yang berkualitas harus mampu memberikan informasi yang berguna bagi para pemangku kepentingan, baik untuk pengambilan keputusan ekonomi maupun untuk menilai akuntabilitas pemerintah. Bestari dan Wahyuni (2023) menekankan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah masih menjadi tantangan di Indonesia karena masih ditemukannya opini BPK yang tidak wajar akibat kelemahan pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap standar. Oleh karena itu, peningkatan kualitas laporan keuangan memerlukan sinergi antara sistem, prosedur, dan kapasitas SDM.

Hubungan antara SIA, SPIP, kompetensi SDM, dan kualitas laporan keuangan dapat dipahami melalui perspektif teori sistem dan teori sumber daya. Teori sistem menjelaskan bahwa organisasi merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas berbagai subsistem yang saling terkait, sehingga kelemahan dalam satu subsistem akan memengaruhi kinerja keseluruhan. Dalam konteks ini, SIA dan SPIP merupakan subsistem yang mendukung penyusunan laporan keuangan, sementara SDM adalah aktor utama yang menjalankan sistem tersebut. Teori sumber daya (*resource-based view*) menjelaskan bahwa keunggulan organisasi dapat dicapai melalui pengelolaan sumber daya internal, termasuk kompetensi SDM. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan dapat dicapai apabila sistem yang digunakan andal, pengendalian internal efektif, dan SDM yang mengelola memiliki kompetensi tinggi.



### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk menguji secara empiris pengaruh sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal pemerintahan, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengujian hipotesis dengan menggunakan data numerik yang dapat dianalisis secara statistik. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan bukti empiris yang objektif mengenai hubungan antarvariabel yang diteliti.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi dan tata usaha keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sukoharjo, yang terdiri dari badan, dinas, bagian, kantor, dan instansi lainnya. Dari total 35 OPD yang ada, penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 20 OPD dengan jumlah responden 60 orang yang ditentukan melalui teknik purposive sampling. Teknik ini digunakan karena tidak semua pegawai dalam OPD memiliki keterlibatan langsung dalam penyusunan laporan keuangan. Responden yang dipilih adalah pejabat atau staf yang berhubungan langsung dengan fungsi akuntansi dan keuangan, seperti kepala subbagian keuangan, bendahara, serta staf bagian akuntansi.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner tertutup. Instrumen penelitian berupa kuesioner disusun berdasarkan indikator dari masing-masing variabel yang merujuk pada penelitian terdahulu dan teori yang relevan. Variabel kualitas laporan keuangan (Y) diukur dengan indikator relevansi, keandalan, keterbandingan, dan keterpahaman (Bestari & Wahyuni, 2023). Variabel sistem informasi akuntansi (X1) diukur dengan indikator integritas, fleksibilitas, aksesibilitas, dan formalisasi sistem (Hafiz et al., 2022). Variabel sistem pengendalian internal pemerintahan (X2) mencakup indikator lingkungan pengendalian, penilaian risiko,

aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan (Dawu et al., 2024). Sementara itu, variabel kompetensi sumber daya manusia (X3) diukur dengan indikator pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, keterampilan teknis, serta pemahaman standar akuntansi (Widilestariningtyas & Azijah, 2024).

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis regresi linier berganda menggunakan perangkat lunak statistik. Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, terlebih dahulu data diuji melalui uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan keandalan instrumen penelitian. Selain itu, uji asumsi klasik juga dilakukan yang mencakup uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas untuk memastikan bahwa data memenuhi persyaratan model regresi. Uji F digunakan untuk menguji kelayakan model secara simultan, sedangkan uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) juga dihitung untuk mengetahui seberapa besar variasi kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen yang diteliti. Secara matematis, model regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Y adalah kualitas laporan keuangan,  $\alpha$  adalah konstanta,  $\beta_1$ ,  $\beta_2$ ,  $\beta_3$  adalah koefisien regresi dari masing-masing variabel independen, dan  $\varepsilon$  adalah error.

Dengan model tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antarvariabel, sekaligus memperkuat bukti empiris terkait peran sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal pemerintahan, dan kompetensi sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### 4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari 60 responden di 20 OPD Kabupaten Sukoharjo,



menunjukkan bahwa mayoritas responden penelitian ini adalah perempuan (72%), sedangkan laki-laki hanya 25% dan sisanya tidak mengisi identitas gender. Hal ini mengindikasikan bahwa fungsi akuntansi di OPD Kabupaten Sukoharjo lebih banyak dikelola oleh pegawai perempuan. Dari segi usia, sebagian besar responden tidak menyertakan identitas (46,7%), namun yang mengisi didominasi oleh kelompok usia 36–45 tahun (18,3%), diikuti oleh kelompok usia 26–35 tahun (15,0%). Dengan demikian, responden yang aktif berperan dalam pengelolaan keuangan daerah berada pada usia produktif.

Dilihat dari tingkat pendidikan, mayoritas responden adalah lulusan S1 (35%), meskipun jumlah responden yang tidak mengisi data pendidikan cukup tinggi (35%). Hal ini menunjukkan bahwa pegawai di OPD relatif memiliki latar belakang pendidikan yang memadai, meskipun masih terdapat beberapa yang berpendidikan menengah (SMA/SMK) maupun diploma (D3). Dari sisi latar belakang pendidikan, hanya 25% responden yang berasal dari bidang akuntansi atau ekonomi, sementara sebagian besar tidak mengisi identitas tersebut (53,3%). Kondisi ini dapat mengindikasikan bahwa tidak semua pegawai pengelola keuangan memiliki dasar pendidikan akuntansi yang kuat.

Dari aspek jabatan, mayoritas responden adalah staf keuangan (38,3%), diikuti oleh kepala bagian keuangan (30%), dan bendahara (15%). Hal ini mencerminkan bahwa data penelitian lebih banyak diperoleh dari pegawai teknis yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan. Terakhir, terkait pelatihan akuntansi, sekitar 48,3% responden pernah mengikuti pelatihan, sementara 36,7% belum pernah, dan sisanya tidak mengisi. Fakta ini menunjukkan bahwa masih terdapat kebutuhan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan akuntansi agar lebih banyak aparatur yang memiliki kompetensi teknis sesuai tuntutan standar akuntansi pemerintahan.

**Tabel 1. Karakteristik Responden**

Kategori Responden	Keterangan	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	15	25%
	Perempuan	43	72%
	Tidak mengisi	2	3%
Usia	≤ 25 tahun	2	3,3%
	26 – 35 tahun	9	15,0%
	36 – 45 tahun	11	18,3%
	≥ 46 tahun	10	16,7%
	Tidak mengisi	28	46,7%
Pendidikan Terakhir	SMA/SMK	4	6,7%
	D3	5	8,3%
	S1	21	35,0%
	Tidak mengisi	21	35,0%
Masa Kerja	< 5 tahun	15	25,0%
	5–10 tahun	27	45,0%
	> 10 tahun	18	30,0%
Latar Belakang Pendidikan	Akuntansi/Ekonomi	15	25,0%
	Non-Akuntansi/Ekonomi	13	21,7%
	Tidak mengisi	32	53,3%
Status Jabatan	Kepala Bagian Keuangan	18	30,0%
	Bendahara	9	15,0%
	Staf Keuangan	23	38,3%
Pelatihan Akuntansi	Pernah	29	48,3%
	Tidak Pernah	22	36,7%
	Tidak mengisi	9	15,0%

Sumber: Data primer yang diolah

Untuk memastikan bahwa instrumen penelitian layak digunakan, dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Hasil uji validitas dan reliabilitas (lihat tabel 2) menunjukkan bahwa semua item kuesioner memiliki nilai korelasi ( $r$  hitung) lebih besar dari  $r$  tabel (0,2144) sehingga dinyatakan valid. Selain itu, nilai Cronbach's Alpha seluruh variabel lebih besar dari 0,7, yang berarti instrumen penelitian ini reliabel dan konsisten digunakan untuk mengukur variabel-variabel penelitian.

Hasil uji asumsi klasik (lihat tabel 3) menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria kelayakan. Uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,098 yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi



normal.

**Tabel 2. Uji Validitas dan reliabilitas**

Variabel	Indikator	r hitung (r tabel: 0,2144)	Cronb ach's Alpha	Ket.
Sistem Informasi Akuntansi (X1)	SIA 1	> 0,783	0,840	Valid dan reliabel
	SIA 2	> 0,605		
	SIA 3	> 0,758		
	SIA 4	> 0,464		
	SIA 5	> 0,707		
	SIA 6	> 0,708		
	SIA 7	> 0,620		
Sistem Pengendalian Internal (X2)	SPI 1	> 0,881	0,769	Valid dan reliabel
	SPI 2	> 0,921		
	SPI 3	> 0,472		
	SPI 4	> 0,759		
	SPI 5	> 0,863		
	SPI 6	> 0,833		
	SPI 7	> 0,609		
Kompetensi SDM (X3)	KSDM 1	> 0,758	0,870	Valid dan reliabel
	KSDM 2	> 0,822		
	KSDM 3	> 0,742		
	KSDM 4	> 0,674		
	KSDM 5	> 0,706		
	KSDM 6	> 0,856		
	KSDM 7	> 0,552		
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	KLP 1	> 0,881	0,890	Valid dan reliabel
	KLP 2	> 0,921		
	KLP 3	> 0,472		
	KLP 4	> 0,759		
	KLP 5	> 0,863		
	KLP 6	> 0,833		
	KLP 7	> 0,609		

Sumber: Data primer yang diolah

Selanjutnya, uji *multikolinearitas* (lihat tabel 3) menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai *VIF* lebih kecil dari 10, masing-masing yaitu sistem informasi akuntansi dengan *tolerance* 0,412 dan *VIF* 2,428, sistem pengendalian internal dengan *tolerance* 0,443 dan *VIF* 2,256, serta kompetensi sumber daya manusia dengan *tolerance* 0,357 dan *VIF* 2,801. Hasil ini mengindikasikan bahwa antarvariabel bebas tidak terjadi *multikolinearitas*, sehingga masing-masing variabel dapat diuji secara independen dalam model.

Uji *heteroskedastisitas* yang dilakukan dengan metode *Glejser* menunjukkan nilai signifikansi pada rentang 0,238 hingga 0,667, seluruhnya lebih besar dari 0,05. Hal ini menandakan bahwa tidak terdapat gejala *heteroskedastisitas*, sehingga varians residual

bersifat homogen. Sementara itu, uji *autokorelasi* dengan menggunakan *Durbin-Watson* menghasilkan nilai sebesar 2,133 yang berada dalam rentang 1,5 hingga 2,5, sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat *autokorelasi* antarresidual dalam model regresi.

**Tabel 3. Uji Asumsi Klasik**

Jenis Uji	Pengujian	Nilai Uji	Kesimpulan
Normalitas	Kolmogorov-Smirnov	0,098	Data berdistribusi normal
Multikolinearitas	Tolerance-VIF	SIA: (Tol 0,412; VIF 2,428) SPI: (Tol 0,443; VIF 2,256) KSDM: (Tol 0,357; VIF 2,801)	Tidak terjadi multikolinearitas
Heteroskedastisitas	Uji Glejser	Sig. 0,238 - 0,667	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Autokorelasi	Durbin-Watson	2,133	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: Data primer yang diolah

Secara keseluruhan, hasil uji asumsi klasik ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian telah memenuhi syarat statistik yang diperlukan. Dengan demikian, hasil analisis regresi linier berganda dapat dinyatakan valid dan layak untuk digunakan dalam menguji hipotesis.

**Tabel 4. Ringkasan hasil uji statistik**

Variabel	Koef. (B)	t hitung	Sig.	Keterangan
Sistem Informasi Akuntansi (X1)	0,725	4,452	0,000	Berpengaruh signifikan
Sistem Pengendalian Internal (X2)	0,109	0,770	0,444	Tidak berpengaruh
Kompetensi SDM (X3)	0,406	2,684	0,010	Berpengaruh signifikan
Uji F	Fhitung: 26,903		0,000	Model layak
Adjusted R <sup>2</sup>	0,568			56,8% dijelaskan model

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda, model persamaan yang diperoleh adalah:



$$Y = 0,725X_1 + 0,109X_2 + 0,406X_3 + \varepsilon$$

Hasil analisis regresi (lihat tabel 4) menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi (SIA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai koefisien 0,725, thitung 4,452, dan signifikansi 0,000 ( $< 0,05$ ). Hal ini menegaskan bahwa semakin baik penerapan SIA, semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Kompetensi sumber daya manusia (SDM) juga berpengaruh signifikan dengan koefisien 0,406, thitung 2,684, dan signifikansi 0,010 ( $< 0,05$ ). Artinya, pegawai yang kompeten mampu menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat, relevan, dan sesuai standar. Sebaliknya, sistem pengendalian internal (SPIP) tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dengan nilai koefisien 0,109, thitung 0,770, dan signifikansi 0,444 ( $> 0,05$ ). Secara simultan, uji F menghasilkan nilai 26,903 dengan signifikansi 0,000 ( $< 0,05$ ), sehingga model regresi dinyatakan layak. Nilai *adjusted* R<sup>2</sup> sebesar 0,568 menunjukkan bahwa 56,8% variasi kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh SIA, SPIP, dan kompetensi SDM, sedangkan sisanya 43,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

Angka koefisien dalam model menunjukkan besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap kualitas laporan keuangan dengan asumsi variabel lain konstan. Koefisien 0,725 pada sistem informasi akuntansi mengandung arti bahwa setiap peningkatan satu satuan pada penerapan sistem informasi akuntansi akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar 0,725 satuan. Koefisien ini juga signifikan secara statistik, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi berperan besar dalam meningkatkan akurasi, relevansi, dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya, koefisien 0,109 pada sistem pengendalian internal meskipun bernilai positif, tetapi tidak signifikan. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan

penerapan sistem pengendalian internal tidak memberikan pengaruh nyata terhadap kualitas laporan keuangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan pengendalian internal di OPD Sukoharjo belum berjalan efektif sehingga tidak mampu memperkuat kualitas pelaporan keuangan. Adapun koefisien 0,406 pada kompetensi sumber daya manusia menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam kompetensi SDM akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar 0,406 satuan. Koefisien ini signifikan, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa SDM yang memiliki pengetahuan akuntansi, keterampilan teknis, serta pengalaman kerja yang baik mampu memberikan kontribusi penting terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Secara keseluruhan, model ini menjelaskan bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi secara dominan oleh sistem informasi akuntansi dan kompetensi SDM, dengan kontribusi ketiga variabel sebesar 56,8%, sementara sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi (SIA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian Hafiz et al. (2022) dan Suhardi (2025) yang menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem akuntansi memperbaiki akurasi, kecepatan, serta transparansi pelaporan keuangan. Dengan demikian, semakin baik integritas, fleksibilitas, dan aksesibilitas SIA di lingkungan OPD, maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Dalam konteks Sukoharjo, hal ini menandakan bahwa digitalisasi akuntansi yang sedang diimplementasikan mulai memberikan dampak positif terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Sementara itu, sistem pengendalian internal pemerintahan (SPIP) tidak berpengaruh



signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil ini konsisten dengan penelitian Kartika dan Ningsih (2024) serta Dawu et al. (2024) yang juga menemukan bahwa SPIP tidak berkontribusi secara langsung terhadap kualitas laporan keuangan di beberapa daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun SPIP secara normatif dirancang untuk meningkatkan integritas laporan, implementasinya di OPD Sukoharjo belum berjalan optimal. Lemahnya pengendalian dapat disebabkan oleh keterbatasan monitoring, rendahnya budaya kepatuhan, serta kurangnya sinergi antarunit dalam melaksanakan prosedur pengendalian. Dengan kata lain, SPIP belum sepenuhnya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang efektif dalam memastikan kualitas laporan.

Kompetensi sumber daya manusia terbukti berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil ini memperkuat penelitian Widilestariningtyas dan Azijah (2024), Armono et al. (2023), serta review Sayidah et al. (2024) yang menyatakan bahwa kompetensi SDM merupakan faktor paling konsisten dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Di Sukoharjo, aparatur yang memiliki pemahaman akuntansi, keterampilan digital, serta pengalaman kerja mampu menyusun laporan keuangan yang lebih akurat dan sesuai standar. Hal ini menegaskan bahwa meskipun sistem dan prosedur sudah tersedia, faktor manusia tetap menjadi penentu utama keberhasilan pelaporan keuangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat bergantung pada pemanfaatan sistem informasi akuntansi yang memadai serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia, sedangkan efektivitas sistem pengendalian internal masih menjadi tantangan yang perlu diperkuat dalam praktik di lapangan.

## 5. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan

sistem pengendalian internal tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Secara simultan, ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan 56,8% variasi kualitas laporan keuangan, sementara sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model penelitian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah lebih ditentukan oleh pemanfaatan sistem informasi akuntansi yang memadai serta kompetensi sumber daya manusia yang andal, sedangkan sistem pengendalian internal masih perlu diperkuat agar dapat berfungsi efektif dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan.

## 6. Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati dalam menginterpretasikan hasilnya. Pertama, penelitian hanya menggunakan data dari responden pada 20 OPD di Kabupaten Sukoharjo sehingga hasilnya belum tentu dapat digeneralisasikan untuk seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Kedua, sebagian responden tidak menyertakan identitas demografis seperti usia, pendidikan, maupun latar belakang pendidikan, sehingga analisis deskriptif responden kurang maksimal dalam menggambarkan profil aparatur pengelola keuangan. Ketiga, penelitian ini hanya menguji tiga variabel independen, yaitu sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi SDM, padahal kualitas laporan keuangan juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti budaya organisasi, kepemimpinan, audit internal, serta dukungan regulasi yang tidak diteliti dalam model.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian pada lebih banyak pemerintah daerah agar hasilnya lebih representatif. Selain itu, pengumpulan data sebaiknya dilakukan dengan cara yang dapat meminimalkan jumlah responden yang tidak menyertakan identitas, sehingga profil responden lebih lengkap untuk dianalisis. Penelitian berikutnya juga dapat



menambahkan variabel lain seperti budaya organisasi, kepemimpinan, pemanfaatan audit internal, maupun faktor eksternal seperti tekanan regulasi atau partisipasi publik, agar model yang dihasilkan lebih komprehensif. Secara praktis, hasil penelitian ini menyarankan agar pemerintah daerah, khususnya OPD di Kabupaten Sukoharjo, memprioritaskan peningkatan kualitas sistem informasi akuntansi berbasis teknologi dan memperkuat kompetensi SDM melalui pelatihan akuntansi dan penguasaan digital, serta terus memperbaiki implementasi sistem pengendalian internal agar berfungsi lebih efektif dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

## 7. Ucapan Terimakasih

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada orang tua yang senantiasa mendukung dan mendoakan peneliti, dan seluruh elemen yang telah berkontribusi pada penulisan penelitian ini.

## Daftar Pustaka

- Adawiah, S. R., & Nuryaman, N. (2023). The influence of human resource competence, accounting standards and accounting systems on the quality of financial reports in the regional government of Purwakarta Regency. *Quantitative Economics and Management Studies*, 4(2), 467–474. <https://doi.org/10.35877/454RI.qems1363>.
- Armono, D., Wicaksono, N. I., Fitriani, A., & Nurhayanto. (2023). Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi SDM dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis Indonesia*, 21(2), 101–112. <https://doi.org/10.20885/jabis.vol21.iss2.art5>
- Bestari, K. A., & Wahyuni, F. (2023). Determinants of local government financial report quality. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 7(2), 157–170. <https://doi.org/10.18196/rabin.v7i2.16995>
- Dawu, L. M. T., Ndolu, A. R. T., Layata, S. M., & Soleman, R. (2024). Pengaruh kompetensi SDM dan implementasi SAP terhadap kualitas laporan keuangan dengan SPI sebagai mediasi. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 8(1), 112–124. <https://doi.org/10.31539/costing.v8i1.13794>
- Hafiz, M., Suryanto, S., Dalimunthe, M. A., Deliana, D., & Napitupulu, I. H. (2022). Pengaruh sistem informasi akuntansi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 7(1), 1–4. <https://doi.org/10.51544/jma.v7i1.2702>
- Jamaluddin, H., & Muttaqim, H. (2025). The effects of human resource competencies, internal controls, and accrual accounting on financial report quality. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 13(1), 23–34. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v13i1.2159>
- Kartika, V. N., & Ningsih, S. (2024). The influence of internal control systems, implementation of government accounting standards, and human resource competence on financial report quality. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 20(1), 55–68. <https://doi.org/10.14710/jaa.v20i1.35397>
- Sayidah, M. S., Prayitno, A., Nirwana, D., & Darmawati. (2024). Human resource competence and internal control systems in regional government financial reporting: A systematic review. *INVOICE: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 6(1), 21–34. <https://doi.org/10.26618/inv.v6i1.12653>
- Suhardi. (2025). The effect of information technology, HR competence, internal control, and organizational culture on the quality of financial reports. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 13(2), 142–153. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i2.2287>
- Widilestariningtyas, O., & Azijah, S. N. (2024). Pengaruh kompetensi SDM dan penerapan SAKD terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 5(1), 77–87. <https://doi.org/10.34010/jemba.v5i1.10984>
- Widodo, S., Sari, M. K., & Handono, W. D. (2025). Strategi transformasi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 23(1), 12–22. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v23i1.21932>

